

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

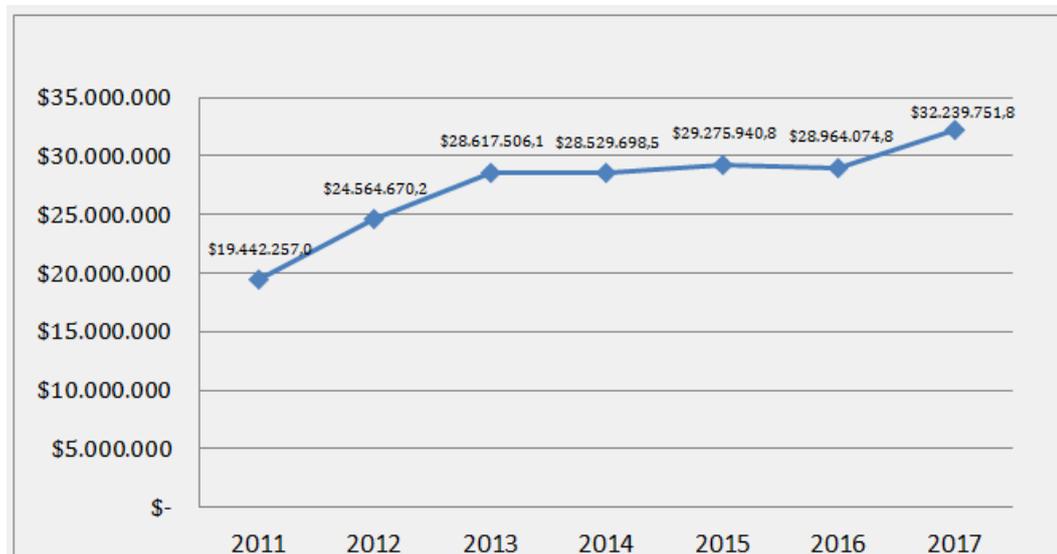
Ciri penting sistem perekonomian yang kian mengglobal ditandai dengan adanya investasi asing langsung. Dalam melakukan proses internasionalisasi bisnis maka investasi asing langsung sangat diperlukan. Perubahan yang terjadi pada investasi asing langsung, baik dari segi cakupan dan metode dikarenakan adanya perkembangan teknologi dan pengurangan pembatasan bagi investor asing di banyak negara. Dengan berkembangannya sistem informasi dan komunikasi yang tak terbatas oleh jarak dan waktu dapat memudahkan investor asing dalam proses investasi.

Investasi asing langsung bermula saat perusahaan dari suatu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain, maka dari itu perusahaan di negara asal (*home country*) dapat mengandalkan perusahaan di negara tujuan (*host country*) baik sebagian atau seluruhnya.

Investasi asing dalam bentuk riil sangat dibutuhkan oleh negara berkembang seperti Indonesia, sebab investasi asing langsung dapat menggerakkan sektor ekonomi dalam mendorong pembangunan karena bagi negara tuan rumah atau perusahaan lokal yang menerima investasi akan meningkatkan berbagai bidang seperti teknologi, proses produk, sistem organisasi, dan ketrampilan manajemen yang baru. Maka dari itu negara-negara ASEAN dengan penghasilan menengah

seperti Indonesia sedang meningkatkan daya saing dan daya tarik sebagai tuan rumah bagi investasi dalam lingkungan ekonomi yang berubah dengan pesat.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki masalah dalam permodalan untuk melakukan pembangunan, maka dari itu diperlukan investasi asing secara rill. Dengan investasi asing ini diharapkan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan pesat, karena jika mengandalkan modal domestik dirasa kurang cukup.



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM), diolah oleh peneliti

**Gambar I.1**  
**Investasi Asing Langsung di Indonesia**

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dapat dilihat bahwa FDI pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar US\$ 5.122.431,9 pada tahun 2013 sebesar US\$ 4.052.835,9 serta tahun 2015 meningkat sebesar US\$ 746.242,3 angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan pada tahun 2012 dan 2013. Penurunan terjadi pada tahun 2014 sebesar US\$ 87.807,6 dan tahun 2016 sebesar US\$ 311. 866. Investasi asing langsung sepanjang tahun 2017 mencapai US\$ 32.239.751,8 atau sebesar Rp 430,5 triliun,

jumlah tersebut jauh lebih besar dari target investasi asing langsung yang hanya sebesar Rp 429 triliun. Namun investasi asing yang masuk ke Indonesia selama tahun 2017 relatif lebih rendah dibandingkan negara tetangga lainnya seperti Vietnam, Thailand dan India yang pertumbuhannya bisa mencapai 20-30% (Hartono, 2018). Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yang menyebabkan investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia lebih rendah dibanding negara lainnya seperti keluhan regulasi yang berubah-ubah tidak stabil dan tumpang tindih, Indonesia yang terlalu luas, masalah pajak, tenaga kerja, masalah lahan dan bangunan serta yang terakhir adalah masalah infrastruktur (Laucereno, 2018).

Sebagai negara berkembang tentunya Indonesia mengharapkan investasi asing yang tinggi untuk menompang pertumbuhan serta pembangunan di Indonesia sehingga bisa mengikuti jejak negara-negara maju lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarwedi bahwa Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana yang besar untuk melakukan pembangunan nasional, karena Indonesia masih mencari dana untuk pembangunan dalam upaya menyetarakan pembangunan diberbagai sektor dari negeri maju, di tingkat regional maupun global (Sarwedi, 2002).

Dengan adanya investasi asing langsung maka akan membantu pembangunan modal serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi pengangguran di Indonesia dimana BPS menyebutkan pengangguran di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 1000 orang menjadi 7,04 juta orang pada Agustus 2017 yang sebelumnya hanya 7.03 juta orang pada Agustus 2016 (Julianto, 2017). Sehingga investasi harus dilakukan dalam rangka meningkatkan taraf hidup

masyarakat, jika bertambahnya kapasitas pendapatan nasional maka kemampuan suatu perekonomian untuk menghasikan barang dan jasa akan semakin bertambah (Suwarno, 2008).

Kebijakan-kebijakan untuk menarik para investor telah dilakukan oleh Presiden RI seperti membuat paket kebijakan jilid XVI. Kebijakan tersebut mencakup percepatan perizinan usaha dari pusat hingga daerah, hal ini bertujuan supaya memudahkan para investor untuk membuka usaha dari tahap pertama hingga akhir (Wijaya, 2017).

Selain itu peran infrastruktur juga merupakan salah satu yang harus dipertimbangkan oleh para investor, ketersediaan infrastruktur yang memadai maka akan menarik para investor. Seperti penelitian yang dilakukan Ahmad dkk bahwa aspek infrastruktur mulai mendapat perhatian lebih besar karena memainkan peran yang semakin penting dalam investasi karena negara-negara berkembang akan menghadapi kesulitan terikat dengan ekonomi global tanpa infrastruktur yang memadai dan berkualitas (Ahmad, Ismail, & Nordin, 2015).

Pembangunan infrastruktur akan mengurangi biaya operasional perusahaan karena berkaitan erat dengan *aksesibilitas* yang lebih besar dan penurunan biaya transportasi. Selain itu ketersediaan barang publik juga dapat mengurangi biaya usaha sehingga akan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Joshua dan Benjamin bahwa dalam jangka panjang pengembangan sektor listrik akan menarik minat para investor asing masuk ke Nigeria, maka dari itu pemerintahan Nigeria harus fokus pada pengembangan

sektor listrik di Nigeria (Joshua Adeyemi dan Benjamin, 2017). Penelitian tersebut membuktikan bahwa barang publik seperti listrik akan menarik para investor asing. Infrastruktur dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap negara-negara berkembang dan maju, di negara berkembang infrastruktur memiliki daya tarik yang signifikan untuk aliran FDI seperti jumlah telephone dan panjang jalan beraspal yang dikemukakan oleh Khadaroo dan Seernah (Khadaroo & Seetanah, 2010).

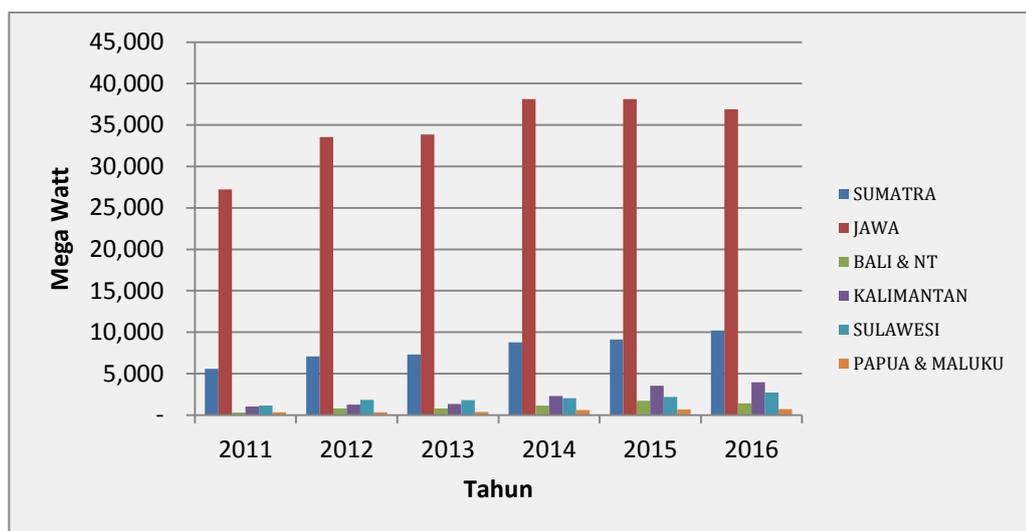
Namun sejumlah masalah dan tantangan sedang dihadapi Indonesia dalam pembangunan Infrastruktur. Walaupun dalam RPJM 2015-2019 telah ditetapkan arahan prioritas pembangunan namun tetap saja tidak dapat menyelesaikan masalah. Menurut RPJM prioritas pembangunan saat ini adalah kondisi jalan, terbatasnya pembangunan jalur kreta api, kinerja pelabuhan yang kurang memadai, rendahnya rasio ketenagalistrikan serta terbatasnya sumber air (E Q, 2016).

Untuk saat ini pengembangan infrastruktur di Indonesia sangat lambat karena adanya kendala di berbagai proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Kendala yang paling menonjol yaitu kurangnya koordinasi yang dilakukan antara pemangku kepentingan sehingga mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan selain itu karena perenanaan yang kurang baik menyebabkan banyak proyek yang dibongkar pasang karena tidak ada koordinasi seperti halnya pengadaan trotoar yang sudah jadi kemudian di bongkar lagi karena ada pembangunan proyek lain yang berada di bawah trotoar tersebut.

Pada tahap penyiapan, kurangnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan dengan adanya keterbatasan pendanaan tersebut mengakibatkan adanya beberapa proyek yang dibangun dan tidak sesuai dengan yang diharapkan seperti halnya pembangunan jalan tol yang roboh karena kualitas bahan baku kurang baik. Selain itu sering terjadi kendala masalah dalam pengadaan lahan yang mengakibatkan tertundanya pencapaian *financial close* untuk proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). KPBU merupakan pendanaan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dan badan usaha sehingga dapat meminimalisir pendanaan infrastruktur yang dianggarkan dalam APBN. Tentunya dalam pendanaan KPBU harus ada skema atau aturan-aturan untuk pendanaan tersebut sehingga tercapai kesepakatan antara pemerintah dengan badan usaha, namun pengetahuan skema pemerintah di daerah masih rendah berbeda dengan pemerintah pusat yang sudah memiliki banyak pengetahuan mengenai skema tersebut. Hal ini menjadikan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil hanya di danai oleh pemerintah tanpa campur tangan dari badan usaha lain.

Sehingga perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut seperti untuk mengatasi regulasi pemerintah telah membuat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPPIP) untuk memimpin koordinasi percepatan infrastruktur prioritas dan mendorong kualitas penyiapan proyek. Dengan adanya langkah-langkah yang yang dibuat pemerintah maka diharapkan pembangunan infrastruktur akan berjalan dengan lancar.

Seperti halnya ketersediaan listrik yang memadai bukan hanya untuk penerangan rumah tetapi listrik juga berperan penting untuk mendorong perekonomian daerah dan nasional. Karena ketersediaan listrik akan menjadi pertanyaan utama para investor sebelum menanamkan modalnya (Setiawan, 2018). Dengan adanya investor yang menanamkan modalnya maka akan mendorong pembangunan industri pengolahan maupun jasa di daerah tersebut sehingga dapat menambah pemasukan daerah maupun nasional serta menyerap tenaga kerja dan dapat mengurangi pengangguran.



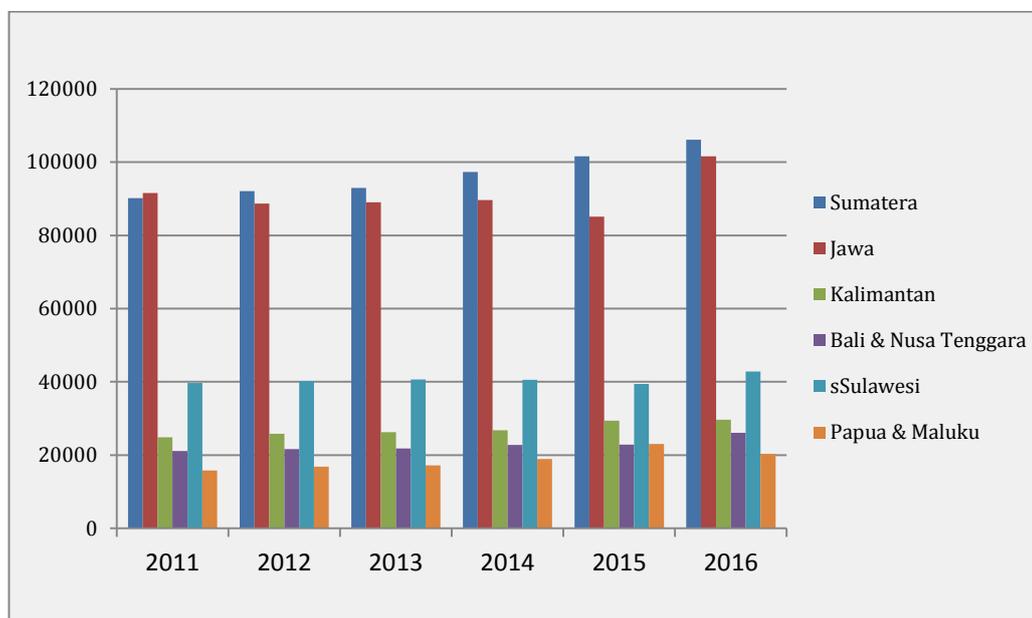
Sumber: Badan Pusat Statistika, diolah oleh peneliti

**Gambar I.2**

**Kapasitas pembangkit listrik yang terpasang berdasarkan pulau di Indonesia**

Persebaran pembangunan infrastruktur di Indonesia masih kurang merata terutama di luar pulau Jawa. Hal tersebut dapat dilihat dari data pembangkit listrik yang terpasang di Indonesia, dimana pulau Jawa memiliki kapasitas terpasang lebih banyak di bandingkan dengan pulau lain di Indonesia yaitu sebesar 36.903 mega watt, pulau Sumatra sebesar 10.185 mega watt, pulau Bali dan Nusa

Tenggara sebesar 1.412 mega watt, pulau Kalimantan sebesar 3.950 mega watt, pulau Sulawesi sebesar 2.720 mega watt serta pulau Maluku dan Papua sebesar 742 mega watt pada tahun 2016. Indonesia bagian timur memiliki kapasitas pembangkit listrik yang rendah padahal daerah tersebut lebih luas jika dibandingkan dengan pulau Jawa. Selain listrik yang tegangannya lebih besar di pulau Jawa ada juga panjang jalan yang lebih panjang di Indonesia bagian barat.



Sumber: Badan Pusat Statistika, diolah oleh peneliti

### Gambar I.3

#### Panjang jalan berdasarkan pulau di Indonesia

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat pada tahun 2016 panjang jalan Pulau Sumatra 106.093 Km, Pulau Jawa 101.568 Km, Pulau Kalimantan 29.692 Km, Pulau Bali dan Nusa Tenggara 26.099 Km, Pulau Sulawesi 42.817 Km, serta Pulau Papua dan sekitarnya hanya 20.360. Pada pembangunan jalan di Indonesia hanya berfokus di Indonesia bagian barat.

Pada distribusi nasional luas Pulau Jawa hanya 7,2% dengan infrastruktur irigasi 65,6%, jalan 27,3% dan air minum 58,4%. Sedangkan untuk Pulau Kalimantan, Maluku dan Papua yang memiliki luas 57,3% dengan infrastruktur irigasi 0,46%, jalan 17,4% dan air minum 7,3% (Mansur, 2015).

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat ketimpangan infrastruktur yang ada di Indonesia sangat tinggi. Kondisi seperti ini yang menjadikan proses investasi asing langsung hanya berfokus di pulau jawa karena keterbatasan fasilitas infrastruktur di daerah lain.

Pengembangan infrastruktur telekomunikasi juga diperlukan bagi para investor asing langsung. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wheeler dan Mody bahwa proksi infrastruktur yang mencakup kualitas transportasi, telekomunikasi dan infrastruktur energi menunjukkan dampak positif terhadap investasi (Wheeler & Mody, 1992). Berdasarkan penelitian lain oleh Asiedu jumlah telepon per 1000 penduduk digunakan untuk mengukur pembangunan infrastruktur menunjukkan bahwa satu unit peningkatan infrastruktur menyebabkan peningkatan investasi asing sebesar 1,12 persen (Asiedu, 2006). Ahmad bahwa infrastruktur telekomunikasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap investasi asing langsung, untuk memberikan kualitas terbaik dalam pelayanan telekomunikasi maka pemerintah dan pihak swasta perlu melakukan kerjasama dalam pengembangan infrastruktur (Ahmad et al., 2015). Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rehman jaringan telepon utama sebagai variabel infrastruktur memberikan dampak yang positif terhadap investasi asing langsung (C. A. Rehman, Ilyas, Mobeen Alam, & Akram, 2011).

Pada saat ini banyak yang mengeluhkan mengenai infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Tingkat ketimpangan sektor telekomunikasi masih sangat tinggi antara perkotaan dan daerah-daerah di Indonesia. Masyarakat daerah masih cukup sulit untuk mendapatkan akses internet karena kualitas sinyal seluler masih buruk (Sudoyo, 2018). Banyak daerah-daerah yang belum ada jaringan telephone seperti halnya di daerah Sulawesi, dimana banyak warga yang memiliki handphone tapi tidak dapat digunakan karena tidak ada jaringan sehingga memperlambat kegiatan ekonomi di daerah tersebut padahal penghasilan masyarakat dan perputaran uang disana cukup besar (Aziz, 2018). Hal serupa juga terjadi di daerah Asmat, menurut Presiden RI sangat sulit untuk menjalankan proyek padat karya karena tidak adanya jaringan telekomunikasi padahal hal tersebut sangat penting guna membuka jalur informasi ke papua (Salim, 2018).

Kondisi infrastruktur di Indonesia masih terbelakang jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya hal tersebut dapat lihat dari perkembangan infrastruktur di Indonesia masih di urutan 72 dunia dan malaysia peringkat 20 untuk begitu juga akses jalan masih diperingkat 72.

Dengan adanya pembangunan yang merata maka akan mempersatukan masyarakat Indonesia, di mana masyarakat dapat melakukan mobilisasi dengan mudah tanpa biaya yang mahal. Namun saat ini ada daerah yang aksesnya masih susah seperti di Indonesia bagian timur, untuk melakukan mobilitas ke daerah lainnya harus menggunakan pesawat, hal tersebut menjadikan interaksi antar penduduk yang ada menjadi sulit. Sehingga dalam pemerintahan Jokowi sedang memprioritaskan pembangunan yang berkeadilan karena akan membuat indonesia

semakin kuat dalam menghadapi persaingan global terutama dalam menarik investor asing.



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal, diolah oleh peneliti

**Gambar I.4**

**10 Provinsi dengan aliran investasi asing terbesar tahun 2017**

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa aliran investasi asing terbesar di Indonesia berada di pulau Jawa. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebanyak US\$ 5,1 miliar dari investasi asing tersebut masuk ke Provinsi Jawa barat. Tercatat terdapat 5.309 proyek yang dilaksanakan di Jawa Barat. Selanjutnya di posisi kedua dengan nilai investasi US\$ 4,5 miliar di tempati oleh Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah proyek sebanyak 8.803 pekerjaan dan di urutan ketiga ada Provinsi Banten dengan dana sebesar US\$ 3,04 dengan jumlah proyek sebesar 2.479.

Hal ini dikarenakan hanya Pulau Jawa yang memiliki infrastruktur yang memadai di bandingkan Pulau-Pulau lainnya serta adanya tenaga kerja yang memiliki ketrampilan (Duta, n.d.). Di bandingkan daerah lain pendidikan di Pulau Jawa juga jauh lebih baik karena ditopang dengan fasilitas yang memadai sehingga menciptakan tenaga kerja yang memiliki ketrampilan.

Sebagai investor tentunya menginginkan biaya rendah dan memaksimalkan keuntungan, dengan adanya pembebanan pajak yang tinggi maka keuntungan menjadi berkurang. Hal ini menjadikan para investor harus mempertimbangkan mengenai kebijakan pajak yang di terapkan negara tujuan investasi.

Untuk saat ini pajak Indonesia masih tinggi yaitu sebesar 25% di bandingkan dengan negara ASEAN lainnya dimana Malaysia sebesar 24%, Vietnam 20%, Thailand 20% dan singapura 17%. Berbagai pihak banyak berharap supaya pajak korporasi di Indonesia diturunkan supaya menarik Investasi asing. Namun penurunan pajak juga harus di imbangi dengan kebijakan pajak lainnya misalkan adanya kenaikan PPN dan adanya timbal balik dari perusahaan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan (Faruq, 2017).

Sejalan dengan uraian di atas, bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi ivestasi asing langsung. Melihat fenomena tersebut timbul suatu pertanyaan apakah naiknya investasi asing langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang seberapa besar pengaruh infrastruktur terhadap investasi asing langsung di Indonesia.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah rendahnya investasi asing langsung di Indonesia disebabkan oleh faktor “Apakah ada pengaruh antara infrastruktur dengan investasi asing langsung?”

## **C. Pembatasan Masalah**

Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, ternyata banyak faktor dalam usaha meningkatkan investasi asing langsung, karena keterbatasan peneliti maka peneliti memutuskan untuk menganalisis pada masalah “Pengaruh Infrastruktur terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia”, peneliti memasukan panjang jalan, listrik dan telekomunikasi sebagai pengukuran indikator infrastruktur yang dapat mempengaruhi investasi asing langsung.

## **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat di rumuskan masalah, yaitu “Apakah ada pengaruh antara infrastruktur terhadap investasi asing langsung di Indonesia”

## **E. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna bagi semua pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Kegunaan teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan baru mengenai indikator-indikator yang memengaruhi infrastruktur terhadap investasi asing langsung. Serta dapat di jadikan bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

### **2. Kegunaan praktis**

Diharapkan bisa di jadikan sebagai bahan pertimbangan serta acuan dalam membuat kebijakan dan pemecahkan masalah mengenai berbagai infrastruktur serta pengaruhnya terhadap investasi asing langsung serta sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah Indonesia supaya mengetahui indikator infrastruktur yang paling memengaruhi FDI sehingga bisa di maksimalkan dalam pembangunan infrastruktu. Diharapkan juga penelitian ini bisa berguna bagi semua pihak.